

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dan formal yang dinyatakan dalam angka dan unit moneter. Oleh karena itu rencana yang disusun dalam bentuk unit moneter, anggaran seringkali disebut rencana keuangan. Anggaran tidak hanya merupakan sebuah rencana keuangan yang dibuat untuk menetapkan biaya dan pendapatan dimasa yang akan datang dalam perusahaan, akan tetapi anggaran juga merupakan alat manajemen yang dapat digunakan untuk mencapai suatu perencanaan-perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. *Budgetary slack* (kesenjangan anggaran) merupakan melebihsajikan biaya dan mengurangsajikan pendapatan yang direncanakan guna untuk mampu mencapai target anggaran (Agustina et al., 2020). Dalam proses penyusunan anggaran perlu diperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak *principal* (atasan) dan *agent* (bawahan) atau sering disebut dengan partisipasi anggaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses penganggaran terjadi dalam lingkungan manusia serta beberapa faktor yang berkaitan dengan perilaku manusia tersebut. Penganggaran secara langsung memiliki dampak terhadap perilaku manusia yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran (Malindha & Tiara, 2022).

Menurut Malindha & Tiara (2022), *budgetary slack* merupakan perbedaan antara jumlah anggaran dan estimasi terbaik dari organisasi. *Budgetary slack* dapat dikatakan sebagai suatu kesenjangan yang dilakukan oleh manajer ketika manajer turut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, dengan memberikan usulandan estimasi anggaran yang tidak sesuai dengan kapasitas sebenarnya yang dimiliki, atau tidak sesuai dengan sumber daya yang sebenarnya dibutuhkan, dengan maksud agar anggaran tersebut mudah direalisasikan.

Ada beberapa alasan terjadinya senjangan anggaran, yaitu yang pertama *budgetary slack* akan membuat kinerja seolah terlihat lebih baik di mata atasan jika mereka bisa mencapai sesuai tujuan anggaran. Kedua, *budgetary slack* sering digunakan untuk mengatasi ketidakpastian memprediksi masa yang akan datang dan ketiga pengalokasian sumber daya akan dilaksanakan berdasarkan proyeksi anggaran biaya, sehingga senjangan membuat fleksibel. Perancangan kesenjangan anggaran bisa dimulai dari pendekatan *agency theory*. Praktik senjangan anggaran dalam perspektif *agency theory* dipengaruhi dengan adanya konflik/pertentangan kepentingan antara agen (manajemen) dengan *principal* yang timbul bila setiap pihak berupaya untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. *Agency theory* merupakan konsep yang menjelaskan Pengaruh kontraktual antara principal dan agents (Anneta, 2022).

Terjadinya *budgetary slack* (kesenjangan anggaran) dikarenakan kurangnya perhatian pada proses kesepakatan anggaran, pembuat keputusan dalam penyusunan anggaran, kepemimpinan yang tidak selektif atau tidak

mempunyai daya pilih, serta terjadinya komunikasi yang kurang antara pihak-pihak dalam penyusunan anggaran. *Budgetary slack* akan mengakibatkan anggaran tidak berfungsi dengan baik sebagai alat penilaian kinerja manajer tingkat bawah karena anggaran yang ditetapkan tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya dari manajer tersebut. Selain itu, masalah yang lebih besar yang akan terjadi adalah *budgetary slack* mempengaruhi penyusunan anggaran periode selanjutnya. Secara berkelanjutan, anggaran yang tidak optimal pada periode sebelumnya akan berpengaruh pada kebutuhan anggaran periode selanjutnya. Indikasi terjadinya *budgetary slack* baru dapat dilihat pada saat anggaran direalisasikan (Agustina et al., 2020).

Di Provinsi Bali terdapat lembaga keuangan mikro selain perbankan yang berperan besar dalam pembangunan daerah. Lembaga keuangan mikro yang dimaksud adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat pada masing-masing desa adat (Widhiastuti et al., 2023). Lembaga Perkreditan Desa atau LPD merupakan suatu Badan Usaha Simpan Pinjam yang dimiliki oleh desa adat yang berfungsi dan bertujuan utama untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif. LPD mempunyai peran sebagai lembaga yang berperan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan. Manajemen LPD dituntut untuk merencanakan masa depan dengan optimal agar dapat terus bertahan dan bersaing. Meningkatnya persaingan bisnis saat ini membawa risiko yang signifikan bagi aspek keuangan perusahaan, di mana keuangan berfungsi sebagai indikator kesehatan suatu perusahaan. Lembaga keuangan milik daerah kini sudah

tersebar hampir di seluruh kota maupun kabupaten di Bali. Salah satunya adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berada di Kota Denpasar.

Salah satu fenomena *budgetary slack* yang terjadi pada LPD Kota Denpasar adalah kasus pada LPD Desa Adat Serangan yang dilakukan oleh Kepala LPD dan pegawai tata usaha periode 2015-2020 dan telah ditetapkan menjadi tersangka di tahun 2022. Mereka tidak mencatat pembayaran bunga atau piutang dalam buku kas dan membuat laporan pertanggungjawaban laba usaha yang fiktif. Selain itu, terdapat 17 kredit fiktif yang dibuat untuk memanipulasi data keuangan. Akibat tindakan ini, LPD Desa Adat Serangan mengalami kerugian hingga sebesar Rp 3.749.118,000 (Kompas, 2022). Manipulasi ini menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga mengganggu pengelolaan dana dan kepercayaan masyarakat terhadap LPD tersebut. Kasus ini menggambarkan bagaimana *budgetary slack* dapat memfasilitasi kegiatan penipuan, seperti penciptaan pinjaman fiktif. Hal ini tidak hanya memengaruhi kesehatan keuangan lembaga tetapi juga merusak kepercayaan pada pelaporan dan tata kelola keuangan.

Faktor-faktor terjadinya *budgetary slack* salah satunya adalah partisipasi anggaran. Partisipasi Anggaran adalah pendekatan penganggaran yang melibatkan manajer dalam pembuatan estimasi anggarannya sendiri. Menurut Prena & Supryadinata (2020), anggaran partisipatif (*participative budget*) atau demokratis adalah proses penganggaran yang memungkinkan manajer tingkat menengah atau bawah terlibat aktif dalam merencanakan aktivitas yang mereka meyakini realistis dapat dicapai. Maka didalam

penyusunan anggarannya diperlukan adanya pembatasan yaitu bawahan dalam menyusun anggaran sesuai dengan proporsional atau rencana dan strategi yang telah ditentukan sehingga dapat mengurangi timbulnya *budgetary slack*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umasangadji et al. (2019), Diansari & Saraswati (2020), Lestari et al. (2019), Paramitha (2022), Dinanti & Taqwa (2022), Malindha & Tiara, (2022) serta Putri & Indraswarawati (2020) mengemukakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap *budgetary slack*. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Pratiwi et al., (2023) mengemukakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap *budgetary slack*.

Asimetri informasi adalah suatu keadaan di mana atasan tidak memiliki cukup informasi dibanding dengan bawahan atau sebaliknya. Jika manajer atasan memiliki lebih banyak informasi dibanding manajer bawahan, maka akan timbul tuntutan yang lebih besar dari manajer atasan kepada manajer bawahan tentang pencapaian target anggaran yang kemungkinan sangat sulit dicapai oleh manajer bawahan dan apabila manajer bawahan memiliki lebih banyak informasi. Perbedaan informasi inilah yang disebut sebagai asimetri informasi (Lestari et al., 2019). Disamping itu, bawahan juga dapat menyembunyikan beberapa informasi pribadi sehingga dapat mempengaruhi anggaran semakin tinggi asimetri informasi, maka akan semakin tinggi terjadinya *budgetary slack*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Latif et al. (2020), Lestari et al. (2019), Malindha & Tiara, (2022), Anneta (2022), Tariani et al. (2023), Rizky (2019), Nazaruddin & Harsanti (2021) serta Anggraini et al. (2023) mengemukakan bahwa asimetri informasi

berpengaruh positif terhadap *budgetary slack*. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Diansari & Saraswati (2020), Paramitha (2022), serta Pratiwi et al. (2023) mengemukakan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap *budgetary slack*.

Self esteem juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. *Self esteem* dapat diartikan sebagai tingkat keyakinan diri. Seseorang dengan tingkat *self esteem* yang tinggi akan menganggap bahwa dirinya bisa dan berhak untuk mendapatkan penghargaan (Panata, 2022). Namun, sifat yang selalu ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu untuk meraih penghargaan mendorong seseorang untuk berperilaku disfungsi. Faktor pribadi khususnya rasa kepercayaan dan penghargaan terhadap diri pribadi dapat memengaruhi seorang pegawai untuk menciptakan *budgetary slack*. (Ambarini & Mispayanti, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gusti & Sofyan (2019), Agustina et al. (2020), Nazaruddin & Harsanti (2021) serta Panata (2022) mengemukakan bahwa *self esteem* berpengaruh positif terhadap *budgetary slack*. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Paramitha (2022), Anggraini et al. (2023) serta Rusmawati (2021) mengemukakan bahwa *self esteem* berpengaruh negatif terhadap *budgetary slack*.

Selain *self esteem*, *budgetary slack* juga dipengaruhi oleh ambiguitas peran. (Kreitner et al., 2019) menyatakan bahwa ambiguitas peran adalah pengharapan orang lain yang tidak diketahui. Ambiguitas peran muncul karena kurangnya informasi/tidak adanya informasi yang disampaikan (Cahyono dan Sulistyawati, 2018). Ketika tidak ada kepastian mengenai

penjelasan kerja dan apa yang diharapkan dari pekerjaannya akan timbul ambiguitas peran (Rivai, 2020) Sedangkan ambiguitas peran menurut Luthans et al. (2019) terjadi ketika individu karyawan tidak memperoleh kejelasan mengenai tugas-tugas dari pekerjaannya atau lebih umum dikatakan tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suprpti et al. (2022), Zulaika (2022), Nazaruddin & Harsanti (2021), Menhard & Safrizal (2023) serta Putri & Indraswarawati (2020) mengemukakan bahwa ambiguitas peran berpengaruh positif terhadap *budgetary slack*. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Diansari & Saraswati (2020) serta Gusti & Sofyan (2019) mengemukakan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap *budgetary slack*.

Komitmen organisasi juga diindikasikan berpengaruh terhadap *budgetary slack*. Menurut Rahardjo (2019) komitmen organisasi yang tinggi akan memotivasi individu untuk melakukan yang terbaik bagi organisasinya, meskipun itu dengan cara yang salah. Salah satu contohnya adalah pegawai melakukan *budgetary slack* dalam organisasinya, agar target anggaran mudah dicapai. Seorang pegawai akan sangat loyal terhadap organisasinya, sehingga mereka akan melakukan apapun untuk dapat menciptakan citra yang baik terhadap organisasinya di mata umum, termasuk melakukan *budgetary slack*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2019), Dinanti & Taqwa (2022), Yandika & Biduri, (2020), Malindha & Tiara, (2022) serta Putri & Firmansyah, (2022) mengemukakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap *budgetary slack*. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Umasangadji et al. (2019), Setyawati et al. (2022) dan Pratiwi

et al. (2023) mengemukakan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap *budgetary slack*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan masih adanya inkonsistensi maka peneliti tertarik kembali untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, *Self Esteem*, Ambiguitas Peran dan Komitmen Organisasi terhadap *Budgetary Slack* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelien ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap *budgetary slack* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar?
2. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap *budgetary slack* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar?
3. Apakah *self esteem* berpengaruh terhadap *budgetary slack* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar?
4. Apakah ambiguitas peran berpengaruh terhadap *budgetary slack* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap *budgetary slack* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap *budgetary slack* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap *budgetary slack* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar.
3. Untuk mengetahui pengaruh *self esteem* terhadap *budgetary slack* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar.
4. Untuk mengetahui pengaruh ambiguitas peran terhadap *budgetary slack* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar.
5. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap *budgetary slack* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

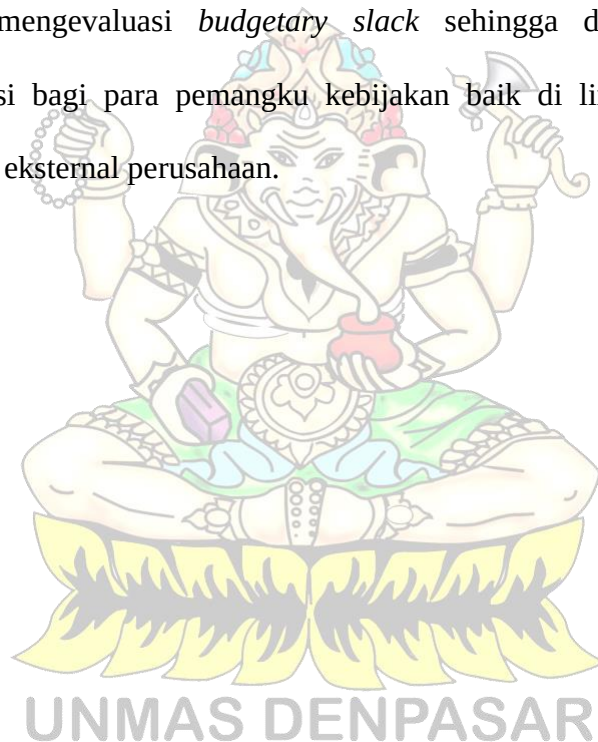
1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi terutama pada bidang keuangan dan memberikan tambahan bukti empiris tentang pengaruh partisipasi anggaran, asimetri informasi, *self esteem*, ambiguitas peran dan komitmen organisasi terhadap *budgetary slack* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah

referensi, informasi, dan wawasan bagi pihak internal dan eksternal perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung kepada pihak internal dan eksternal perusahaan dalam melihat *budgetary slack* khususnya pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi perusahaan publik dalam mengevaluasi *budgetary slack* sehingga dapat memberikan informasi bagi para pemangku kebijakan baik di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan dari keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau beberapa orang *principal* melibatkan *agent* untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Pada teori keagenan ini seorang individu akan lebih termotivasi untuk mencapai kepentingan pribadinya, sehingga akan berdampak buruk terhadap hubungan antara *principal* dan juga *agent* (Lubis et al., 2019)

Menurut Ones & Agustina (2016), setiap individu dapat bertindak demi kepentingan pribadi mereka, yang kemudian dapat berdampak pada independensi sebuah anggaran. Dalam teori keagenan terdapat tiga asumsi yang dijelaskan, yaitu memiliki keterbatasan rasionalitas, mementingkan diri pribadi, dan menghindari risiko. Menurut ketiga asumsi yang disampaikan tersebut, manusia akan cenderung untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan organisasinya untuk memperoleh jenjang karir yang lebih baik di masa depan (Pramesti & Sujana, 2020).

Berdasarkan teori keagenan, tindakan *budgetary slack* dapat terjadi karena terdapat konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent* yang terjadi ketika setiap pihak sama-sama untuk berusaha mencapai atau

mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Hal ini dapat terjadi contohnya dalam melakukan kebijakan pemberian *reward* kepada *agent* yang didasarkan pada pencapaian anggaran. Sehingga *agent* akan memberikan informasi yang bias kepada *principal* dengan melakukan *budgetary slack*, tentunya hal ini akan menguntungkan bagi kepentingan pribadi seorang *agent* (Pratiwi & Widanaputra, 2016).

Dalam Lembaga Perkreditan Desa (LPD), *principal* merujuk pada pihak yang memberikan mandat atau kepercayaan kepada agen untuk mengelola sumber daya, sementara *agent* adalah pihak yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan tugas tersebut. Di LPD, pengurus berfungsi sebagai agen yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan bagi desa pakraman sebagai *principal*. Namun, terdapat potensi konflik kepentingan, di mana agen mungkin lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan *principal*, sehingga dapat menimbulkan masalah keagenan. Teori ini menjelaskan suatu permasalahan yang diakibatkan oleh para pelaku yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam pemberian kredit yang dapat terjadi konflik kepentingan antara *principal* (pihak LPD) dan *agent* (debitur), dimana debitur tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kepada pihak LPD dan hal ini berdampak pada profitabilitas dan kelangsungan usaha di LPD (Ardyani & Suarmanayasa, 2021).

Dalam penyusunan anggaran di LPD, fenomena *budgetary slack* muncul ketika agen memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi organisasi yang cenderung mengatur anggaran sedemikian rupa untuk

memudahkan pencapaian target yang telah ditetapkan. Sebagai agent, pengurus LPD bertanggungjawab untuk memaksimalkan keuntungan principal, namun disisi lain pengurus LPD juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraanya, sehingga tidak bertindak sesuai kepentingan *principal* dan berdampak terjadinya *agency problem* (Widhiastuti et al., 2023). Hal ini sering kali dilakukan dengan memberikan informasi yang bias atau tidak akurat mengenai kapasitas dan kebutuhan anggaran. Konflik kepentingan ini terjadi karena agen berusaha untuk memaksimalkan kompensasi atau keuntungan pribadi mereka, sementara principal ingin memaksimalkan utilitas dan profitabilitas organisasi. Ketidakmampuan principal untuk memonitor secara langsung aktivitas agen memperburuk masalah ini, menciptakan asimetri informasi yang dapat mengarah pada praktik *budgetary slack*.

2.1.2 *Budgetary Slack*

Menurut Lubis et al. (2019), anggaran merupakan rencana yang dituangkandalam suatu naskah tulisan yang disusun secara sistematis serta dinyatakan dalam satuan moneter, dimana meliputi seluruh kegiatan dari perusahaan dan akan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Selanjutnya, proses kegiatan untuk menghasilkan anggaran kerja disebut sebagai proses penganggaran. Biasanya dalam proses penganggaran akan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, yang mencakup fungsi pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, serta alat pengawasan kerja. Dewasa ini, penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dianggap

lebih penting, hal ini karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat telah percaya, maka masyarakat akan lebih bersedia untuk memberikan kontribusinya kepada pemerintah. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa penyusunan serta sistem penganggaran pemerintah dikelola secara efektif dan efisien, dan juga tidak ada manipulasi serta kelonggaran (*slack*) dalam proses alokasi sumber daya mereka (Mat et al., 2018). Tujuan dari penyusunan anggaran adalah sebagai berikut (Lubis et al., 2019):

1. Menyatakan harapan ataupun sasaran dari organisasi secara jelas dan juga formal, sehingga dapat menghindarkan dari kerancuan serta membantu memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai oleh organisasi.
2. Menyampaikan harapan organisasi kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan juga dilaksanakan.
3. Menyediakan rencana yang terperinci mengenai aktivitas, dengan maksud mengurangi ketidakpastian serta memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.
4. Mengkoordinasikan cara ataupun metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya.
5. Menyediakan alat pengukur serta mengendalikan kinerja individu dan juga kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.

Menurut Lubis et al. (2019), *budgetary slack* merupakan tindakan penggelembungan anggaran kerja, dimana terdapat selisih antara sumber daya yang ada sebenarnya dan diperlukan secara efisien untuk menyelesaikan tugas

dan jumlah dari sumber daya yang lebih besar yang diperuntukan bagi tugas tersebut. Oleh karena itu, *slack* biasanya akan dilakukan dengan menganggarkan belanja yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih rendah atau dengan menyatakan terlalu tinggi jumlah dari *input* yang akan digunakan untuk memproduksi suatu unit *output*.

Menurut Pramesti dan Sujana (2020), *budgetary slack* merupakan perbedaan antara jumlah anggaran yang dinyatakan dengan estimasi yang sesungguhnya dengan tujuan agar target mudah dicapai. Indikasi terjadinya *budgetary slack* baru dapat terlihat ketika anggaran telah direalisasikan. *Budgetary slack* dapat berdampak pada menurunnya tingkat efisiensi suatu organisasi, hal ini dapat terjadi karena masih adanya pengalokasian anggaran yang dianggap kurang optimal, sehingga akan berdampak buruk bagi organisasi sektor publik.

Fenomena *budgetary slack* di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sering kali terjadi sebagai upaya untuk menciptakan ruang bagi manajer dalam mencapai target yang lebih mudah, sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka di mata pemangku kepentingan. Banyak kasus LPD yang terjadi di Bali khususnya di Kota Denpasar, seperti misalnya ada LPD yang tidak sehat. Ini terjadi diduga karena adanya penyalahgunaan dalam penggunaan anggaran (Putri & Wirama, 2016). Salah satu kasus *budgetary slack* yang terjadi pada LPD Kota Denpasar adalah kasus pada LPD Desa Adat Serangan yang dilakukan oleh Kepala LPD dan pegawai tata usaha periode 2015-2020 yang dilakukan dengan tidak mencatat pembayaran bunga atau piutang dalam buku kas dan membuat laporan pertanggungjawaban laba

usaha yang fiktif, serta membuat 17 kredit fiktif yang dibuat untuk memanipulasi data keuangan (Kompas, 2022). *Budgetary slack* dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan mengurangi transparansi dalam pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

2.1.3 Partisipasi Anggaran

Partisipasi anggaran dapat diartikan sebagai proses yang mendeskripsikan perilaku individu-individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan memiliki suatu pengaruh terhadap suatu target anggaran (Brownell, 1982). Sedangkan menurut Lubis et al. (2019), partisipasi anggaran dapat diartikan sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua pihak atau lebih dan dianggap akan berdampak di masa yang akan datang bagi mereka yang memerlukan.

Apabila dikaitkan dengan proses perencanaan anggaran, partisipasi anggaran akan mengacu pada keterlibatan pegawai tingkat menengah maupun bawah dalam proses pengambilan keputusan yang mengarah pada tujuan serta pencapaian sasaran kinerja dalam sebuah anggaran organisasi. Keterlibatan tersebut dapat bervariasi, mulai dari hanya ikut hadir dalam pertemuan sampai dengan ikut andil dalam penetapan sasaran kinerja organisasi (Lubis et al., 2019)

Akan tetapi, adanya partisipasi anggaran juga memiliki keterbatasan tersendiri, proses partisipasi yang memberikan kekuasaan kepada *agent* dianggap akan menyebabkan terjadinya disfungsi bagi organisasi

tersebut. Misalnya, seorang *agent* dapat memasukkan *slack* ke dalam suatu anggaran organisasi (Lubis et al., 2019). Adanya partisipasi dalam proses penyusunan anggaran dianggap akan memunculkan harapan penerimaan *reward* yang berkaitan dengan pencapaian anggaran, hal ini dapat memberikan peluang bagi bawahan untuk melakukan tawar menawar anggaran agar mudah untuk dicapai (Schiff & Lewin, 2019).

Partisipasi anggaran di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan keberlanjutan operasional dan pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. Sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa, LPD memerlukan alokasi anggaran yang jelas agar dapat menjalankan fungsinya dengan efektif, baik dalam pemberian kredit mikro maupun pengelolaan dana sosial. Penganggaran yang partisipatif melibatkan masyarakat dan pemerintah desa dalam perencanaan serta pengawasan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki dan transparansi. Partisipasi anggaran diperlukan untuk menyelaraskan tujuan setiap bagian dalam organisasi secara keseluruhan, dengan harapan kinerja yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi (Kresnayana et al., 2020).

2.1.4 Asimetri Informasi

Asimetri informasi dapat diartikan sebagai suatu ketidakseimbangan informasi yang bawahan (agen) miliki atau atasan (prinsipal) mengenai suatu tanggungjawab. Salah satu diantara bawahan atau pun atasan akan memiliki

informasi yang lebih. Hal ini mengakibatkan diantara mereka memberikan informasi yang bias (Ningsih & Indira, 2020).

Senjangan anggaran terjadi ketika bawahan mengecilkan target anggaran dengan cara menyampaikan laporan anggaran di bawah kinerja yang diinginkan (Ningsih & Indira, 2020). Agen punya pemahaman yang lebih terkait tanggungjawab pada bidang bagian agen tersebut maka dari itu agen lebih mengetahui biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu, agen akan membantu membuat anggaran dengan target yang sangat mudah untuk diraihny (Pramudiati & Erlinawati, 2021). Asimetri informasi terbagi kedalam dua jenis yaitu:

1. *Adverse selection*, dapat diartikan sebagai suatu ketidaksamaan informasi yang dimiliki oleh atasan dan bawahan. Dengan perbedaan informasi tersebut membuat bawahan menyembunyikan informasi yang dimiliki guna memperoleh keuntungan pribadi.
2. *Moral hazard*, yaitu ketika prinsipal tidak bisa selamanya melakukan pengawasan serta mengetahui apa yang dilaksanakan oleh agen. Masalahnya yakni perubahan perilaku agen setelah kontrak disetujui. Hal ini mengakibatkan kerugian organisasi demi agen mengajjar keuntungan pribadi.

Asimetri informasi di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) seringkali menjadi kendala dalam pengelolaan dan distribusi dana, yang bisa berdampak pada efektivitas operasional dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, asimetri informasi terjadi ketika pihak yang mengelola LPD memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan anggota masyarakat atau

peminjam, yang dapat mengakibatkan keputusan yang kurang tepat atau tidak transparan dalam pemberian pinjaman. Terjadinya Asimetri Informasi dikarenakan kurangnya transparansi atau keterbukaan antara pihak pengelola dana kepada pihak masyarakat atau nasabah LPD untuk memperoleh informasi mengenai uang yang mereka investasikan (tabung) (Pujayani & Dewi, 2021).

2.1.5 *Self Esteem*

Menurut Lubis et al. (2019), *self esteem* secara langsung berkaitan dengan harapan untuk sukses. Seseorang dengan *self esteem* yang tinggi akan memiliki keyakinan bahwa dirinya akan berhasil di tempat kerjanya serta lebih berani untuk mengambil risiko terkait pekerjaan apa yang akan mereka pilih. *Self esteem* juga diartikan seberapa jauh seseorang mampu meyakini bahwa dirinya adalah seorang yang berharga dan berhak untuk mendapat pencapaian. Seseorang dengan *self esteem* yang tinggi akan mencari pekerjaan yang berstatus lebih tinggi dan akan menikmati kepuasan batin yang lebih tinggi dari suatu pencapaiannya (Bangun et al., 2019)

Menurut Ambarini dan Mispiyanti (2020), *self esteem* merupakan suatu perasaan keberhargaan seseorang terhadap dirinya sendiri, sehingga seseorang dengan *self esteem* yang tinggi biasanya akan termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik agar berhak untuk mendapat penghargaan. Namun, seseorang yang termotivasi untuk selalu memperlihatkan dan memastikan nilai dirinya baik untuk mendapat penghargaan bisa saja melakukan disfungsi, yaitu dalam hal ini *budgetary slack*. Hal ini sesuai

dengan teori agensi, yang mengasumsikan bahwa setiap individu bertindak untuk kepentingan pribadi, sehingga dapat berpengaruh pada independensi anggaran (Ones & Agustina, 2016).

Menurut Pamungkas et al. (2014), *budgetary slack* juga dapat muncul dikarenakan faktor personal, yaitu adanya kesempatan untuk lebih mementingkan kepentingan pribadi dalam proses penyusunan anggaran. Seorang individu akan lebih condong untuk mendahulukan kepentingan pribadinya. *Budgetary slack* tidak hanya terjadi karena faktor keuangan saja, akan tetapi juga faktor luar yang bahkan tidak berkaitan dengan anggaran, terutama yang berkaitan dengan perilaku dari individu. Salah satunya adalah kebanggaan individu bila dapat melakukan tugas dengan baik, serta pujian dari atasan.

Self esteem atau harga diri memiliki peran penting dalam konteks Lembaga Perkreditan Desa (LPD), terutama dalam membentuk sikap dan perilaku pegawai. *Self esteem* merupakan keyakinan dan kepercayaan individu terhadap segala kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Ketika seorang pegawai LPD yang memiliki *self esteem* sehat cenderung menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, seperti memberikan layanan yang baik kepada nasabah dan mengambil inisiatif untuk meningkatkan efisiensi operasional. Individu yang memiliki harga diri tinggi cenderung akan percaya diri terhadap karakter dan kompetensi yang dimilikinya, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan efektif (Anggraini et al., 2023).

2.1.6 Ambiguitas Peran

Ambiguitas peran merupakan suatu kondisi dimana karyawan tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai arahan dan tujuan yang jelas peran yang dialami karyawan dapat mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi seseorang. Keambiguitasan peran dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menghadapi pekerjaan yang nantinya dapat menghambat pencapaian kinerja yang diharapkan dan tentunya akan merugikan organisasi.

Ambiguitas peran (*role ambiguity*), merupakan ketidaksesuaian individu dalam menetapkan perannya dalam organisasi secara optimal dengan begitu pekerjaan yang dikerjakan individu menjadi kurang efektif (Yuliana & Ratnadi, 2016). Robbins et al. (2019) menyatakan ambiguitas peran terjadi ketika *role expectation* tidak secara jelas dimengerti, maka menyebabkan konflik peran yang dapat mempengaruhi terjadinya *budgetary slack*. Penelitian terdahulu menjelaskan tingginya *role ambiguity* individu dalam organisasi maka akan menyebabkan tingginya *budgetary slack* (Yuliana & Ratnadi, 2016).

Peran ganda (ambiguitas peran) muncul ketika seseorang berharap memegang peran tentunya tetapi tidak secara jelas dimengerti dan tidak yakin pada apa yang di lakukannya. Menurut Luthans et al. (2019), ambiguitas peran terjadi ketika individu karyawan tidak memperoleh kejelasan mengenai tugas-tugas dari pekerjaannya atau lebih umum dikatakan tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Menurut Bahrin et al. (2024), ambiguitas peran diduga mempengaruhi timbulnya *budgetary slack*, karena ketika individu tidak memperoleh kejelasan mengenai tugas-tugas dari pekerjaannya maka akan

muncul potensi untuk melakukan *budgetary slack*. Ketika tidak ada kepastian mengenai penjelasan kerja dan apa yang diharapkan dari pekerjaannya akan timbul ambiguitas peran (Rivai, 2020).

Ambiguitas peran di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat terjadi ketika anggota atau pengurus lembaga tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab dan kewajiban mereka. Ketidakjelasan ini bisa menyebabkan kebingungannya dalam mengambil keputusan yang tepat atau bahkan mengarah pada konflik antar anggota. Ambiguitas peran di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat terjadi ketika seorang anggota pengurus memiliki tanggung jawab ganda, seperti sebagai pengelola keuangan sekaligus sebagai pemutus kebijakan. Ambiguitas peran juga disebabkan karena meningkatnya tuntutan pekerjaan, tekanan waktu dalam penyelesaian tugas, dan ketidakpastian pengawasan oleh atasan yang mengakibatkan karyawan harus menebak dan memprediksikan sendiri setiap tindakannya (Yasa, 2017). Hal ini menunjukkan pentingnya definisi yang jelas mengenai peran untuk memastikan kelancaran operasional di LPD.

2.1.7 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi dapat diartikan sebagai loyalitas atau suatu kepatuhan yang konstan dari anggota organisasi terhadap organisasinya (Setiawan & Ghozali, 2016). Sedangkan menurut Lubis et al. (2019), komitmen organisasi diartikan dengan sejauh mana seorang pekerja akan memihak pada organisasinya serta memiliki niat untuk bertahan dalam organisasinya. Lebih lanjut, Lubis juga menyatakan bahwa komitmen

organisasi adalah sikap yang dapat mencerminkan perasaan suka ataupun tidak suka dari seorang pekerja atau pegawai terhadap organisasinya. Dalam hubungannya dengan variabel *budgetary slack*, seseorang dengan tingkat komitmen organisasi yang tinggi dianggap akan cenderung untuk lebih mementingkan kepentingan organisasinya, sehingga mereka akan melakukan apapun untuk membuat citra organisasinya baik dimata pihak luar, termasuk melakukan *budgetary slack*. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki tingkat komitmen organisasi yang rendah, maka mereka akan terkesan untuk tidak peduli dengan kondisi organisasinya (Jaya & Rahardjo, 2019). Komponen utama komitmen organisasi yaitu (Lubis et al., 2019):

1. Komitmen afektif (*affective commitment*), merupakan komitmen yang terjadi apabila seorang karyawan berkeinginan untuk menjadi bagian dari suatu organisasi karena keterikatan emosional ataupun psikologis terhadap organisasi. Komitmen afektif umumnya merupakan komitmen yang paling dibutuhkan oleh organisasi, hal ini karena orang dengan komitmen afektif dianggap lebih memiliki loyalitas yang tinggi.
2. Komitmen kontinu (*continuance commitment*), komitmen yang muncul apabila seorang karyawan memilih bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji atau keuntungan lainnya, bisa dikatakan juga karena karyawan tersebut tidak dapat menemukan pekerjaan lainnya. Dengan kata lain bahwa karyawan berada di organisasi tersebut karena membutuhkannya.
3. Komitmen normatif (*normative commitment*), merupakan komitmen yang muncul karena nilai diri karyawan. Seorang karyawan akan tetap berada

dalam keanggotaan dari suatu organisasi karena menganggap bahwa komitmen organisasi memang perlu untuk dilakukan. Dengan kata lain seorang karyawan berada dalam organisasi tersebut karena dia merasa berkewajiban untuk itu.

Komitmen organisasi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat terlihat ketika para anggota dan pengurus menunjukkan kesetiaan dan dedikasi tinggi terhadap tujuan dan keberlanjutan lembaga tersebut. Menurut (Luthans et al., 2019), komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan loyalitas karyawan terhadap organisasi mereka dan proses yang berkelanjutan dimana peserta organisasi mengkreasikan kepedulian. Misalnya, para pengurus yang aktif terlibat dalam merencanakan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat desa, serta berusaha menjaga keberlanjutan keuangan LPD, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap organisasi. Komitmen ini sering kali diwujudkan melalui keinginan untuk memastikan bahwa LPD tidak hanya berkembang, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan anggota desa.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *budgetary slack* dalam suatu perusahaan. Berikut adalah hasil penelitian sebelumnya:

1. Gusti & Sofyan (2019) meneliti tentang pengaruh tekanan anggaran, ambiguitas peran, *opportunistic behaviour*, dan *self esteem* terhadap *budgetary slack*. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan

metode total *sampling*, dengan jumlah sampel adalah sebanyak 29 OPD. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan anggaran tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Ketidakjelasan peran tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Perilaku oportunistik tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran dan harga diri juga berpengaruh terhadap senjangan anggaran.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel independen *self esteem* dan ambiguitas peran. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *budgetary slack*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama dapat dilihat pada tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2019. Kedua, dapat dilihat pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar, dimana pada penelitian sebelumnya tidak pernah dilakukan.

2. Sari et al. (2019) meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran, asimetri informasi, *budget emphasis* dan komitmen organisasi terhadap *budgeting slack*. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 144 responden. Teknik analisis

data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap *budgetary slack*. Asimetri informasi berpengaruh terhadap *budgetary slack*. *Budget emphasis* berpengaruh terhadap *budgetary slack*. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap *budgetary slack*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel independen partisipasi anggaran, asimetri informasi, dan komitmen organisasi. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *budgetary slack*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama dapat dilihat pada tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2019. Kedua, dapat dilihat pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar, dimana pada penelitian sebelumnya tidak pernah dilakukan.

3. Diansari & Saraswati (2020) meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran, asimetri informasi, penekanan anggaran, dan ambiguitas peran terhadap *budgetary slack* (organisasi perangkat daerah Kota Yogyakarta). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 58 responden. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap senjangan anggaran sedangkan asimetri informasi, penekanan anggaran, dan ambiguitas peran tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran pada organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel independen partisipasi anggaran, asimetri informasi. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *budgetary slack*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama dapat dilihat pada tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2020. Kedua, dapat dilihat pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar, dimana pada penelitian sebelumnya tidak pernah dilakukan.

4. Putri & Indraswarawati (2020) meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran, asimetri informasi, komitmen organisasi, dan ketidakpastian lingkungan pada senjangan anggaran. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 51 responden. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji

normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terhadap partisipasi anggaran dalam menangani kesepakatan anggaran dan dari hasil penelitian asimetri informasi yang tidak mempunyai pengaruh pada urusan anggaran, dari hasil penelitian diketahui ada pengaruh pada organisasi adalah anggaran kesepakatan dan dari hasil penelitian tentang asimetri informasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel independen partisipasi anggaran, asimetri informasi, dan komitmen organisasi. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *budgetary slack*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama dapat dilihat pada tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2020. Kedua, dapat dilihat pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar, dimana pada penelitian sebelumnya tidak pernah dilakukan.

5. Dinanti & Taqwa (2022) meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap *budgetary slack* dengan motivasi dan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 93 responden. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji

normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan kelonggaran anggaran. Sedangkan hasil analisis regresi moderasi menunjukkan dua hipotesis yang tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran yaitu interaksi antar partisipasi anggaran dan motivasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap anggaran kendur, interaksi antara partisipasi anggaran dan komitmen organisasi mempunyai hubungan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap senjangan anggaran.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel independen partisipasi anggaran, dan komitmen organisasi. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *budgetary slack*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama dapat dilihat pada tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2022. Kedua, dapat dilihat pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar, dimana pada penelitian sebelumnya tidak pernah dilakukan.

6. Panata (2022) meneliti tentang pengaruh pemberian insentif dan *self esteem* terhadap *budgetary slack*. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode eksperimental faktorial antar subjek, dengan jumlah sampel adalah sebanyak 84 partisipan mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Teknik

analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan *Analysis of Variance* (ANOVA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian insentif berpengaruh terhadap terciptanya *budgetary slack*. Hal ini dikarenakan partisipan termotivasi untuk memperoleh insentif lebih. Hasil penelitian yang kedua menunjukkan bahwa *self esteem* berpengaruh terhadap terciptanya *budgetary slack*. Hal ini dikarenakan partisipan yang dengan *self esteem* yang tinggi percaya akan kemampuannya sendiri untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel independen *self esteem*. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *budgetary slack*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama dapat dilihat pada tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2022. Kedua, dapat dilihat pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar, dimana pada penelitian sebelumnya tidak pernah dilakukan

7. Paramitha (2022) meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran, informasi asimetri dan *self esteem* terhadap *budgetary slack*. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah

sampel adalah sebanyak 94 responden. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap *budgetary slack*, informasi asimetri tidak berpengaruh terhadap *budgetary slack*, dan *self esteem* tidak berpengaruh terhadap *budgetary slack*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel independen partisipasi anggaran, informasi asimetri dan *self esteem*. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *budgetary slack*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama dapat dilihat pada tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2022. Kedua, dapat dilihat pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar, dimana pada penelitian sebelumnya tidak pernah dilakukan.

8. Setyawati et al. (2022) meneliti tentang pengaruh komitmen organisasi, partisipasi anggaran, penekanan anggaran, sumber daya manusia dan ketidakpastian lingkungan terhadap kesenjangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) di Kecamatan Penebel. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan jumlah sampel adalah sebanyak 90 responden. Teknik analisis data

menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kesenjangan anggaran, partisipasi dan penekanan anggaran berpengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran. Manusia ketidakpastian sumber daya dan lingkungan tidak berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel independen partisipasi anggaran, dan komitmen organisasi. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *budgetary slack*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama dapat dilihat pada tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2021. Kedua, dapat dilihat pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar, dimana pada penelitian sebelumnya tidak pernah dilakukan.

9. Suprpti et al. (2022) meneliti tentang *analysis of budgetary slack trigger determinants in State Universities*. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan jumlah sampel adalah sebanyak 50 pegawai aktif di Universitas Negeri Semarang. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, organisasi komitmen dan harga diri berpengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya Anggaran Kendur. Artinya ketika suatu perusahaan mampu meningkatkan partisipasi anggarannya karyawannya dan didukung oleh tingginya komitmen organisasi dari karyawannya akan secara signifikan meminimalkan terjadinya penipuan pelaporan keuangan seperti Anggaran Kendur. Selanjutnya variabel asimetri informasi dan harga diri mempunyai pengaruh positif signifikan berpengaruh terhadap terjadinya *budgetary slack*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel independen partisipasi anggaran, dan komitmen organisasi. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *budgetary slack*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama dapat dilihat pada tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2022. Kedua, dapat dilihat pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar, dimana pada penelitian sebelumnya tidak pernah dilakukan.

10. Pratiwi et al. (2023) meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran, penekanan anggaran, asimetri informasi, komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran, dan ketidakpastian lingkungan terhadap *budgetary slack* (studi empiris pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Jepara). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode

purposive sampling, dengan jumlah sampel adalah sebanyak 100 orang. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap *Budgetary Slack*. Penekanan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap *Budgetary Slack*. Asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap *Budgetary Slack*. Komitmen organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap *Budgetary Slack*. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Senjangan Anggaran dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif signifikan dan positif signifikan terhadap Senjangan Anggaran.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel independen partisipasi anggaran, asimetri informasi, dan komitmen organisasi. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *budgetary slack*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama dapat dilihat pada tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2023. Kedua, dapat dilihat pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar, dimana pada penelitian sebelumnya tidak pernah dilakukan.